

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TAHUN 2021  
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)  
KECAMATAN PRAYA TENGAH  
TAHUN 2022**


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT kami panjatkan, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia Nya semua tugas dan tanggung jawab kami di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah termasuk penyusunan LKj-IP Kecamatan ini dapat terlaksana dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan ini merupakan media pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Praya Tengah pada Tahun Anggaran 2021. Dalam laporan ini dipaparkan capaian kinerja seluruh program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dengan mengetahui capaian kinerja tersebut maka dapat diukur sejauh mana sasaran output dan outcome dapat direalisasikan.

Informasi yang terangkum tersebut tentunya akan sangat berguna tidak hanya dalam konteks mengukur keberhasilan yang dicapai tetapi lebih jauh lagi sebagai masukan atau bahan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan sekarang ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan semoga apa yang kami sajikan ini mempunyai kontribusi yang besar bagi Kecamatan Praya Tengah khususnya dan bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya dalam berkiprah membangun daerah tercinta ini. Amin

Batunyalu, Januari 2022  
**CAMAT PRAYA TENGAH,**  
  
**H. LALU SAMSUL HILAL, S.IP**  
Pembina ( IV/a )  
NIP. 196507031994011001

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL.....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1 Tugas, Fungsi OPD .....	1
I.2 Data Kepegawaian .....	5
I.3 Struktur Organisasi OPD.....	7
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>9</b>
II.1 Rencana Strategis .....	9
II.2 Rencana Kinerja Tahunan .....	13
II.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD .....	
II.4 Perjanjian Kinerja SKPD .....	
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>14</b>
III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja .....	14
III.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran .....	15
III.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja pencapaian Tujuan Strategis SKPD .....	23
III.4. Akuntabilitas Keuangan.....	25
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>33</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. CASCADING KINERJA	
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	
4. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021	

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat Praya Tengah Tahun 2021 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Camat Praya Tengah Tahun 2016 - 2021. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Praya Tengah menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2016 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Kantor Camat Praya Tengah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, dengan 4 (empat) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Praya Tengah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas layanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	80	83,48	104,35
Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa maju di wilayah kecamatan	78%	78%	100,00
Meningkatnya peran serta masyarakat dan stake holder terkait dalam pengendalian trantibum	Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan masyarakat	75%	52,63%	70,17
	Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan stake holder	75%	84%	112,28

Dari ilustrasi tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis Meningkatkan kualitas layanan publik dengan **indikator kinerja Indeks kepuasan layanan kecamatan** terealisasi 83,48 poin atau sebesar 104,35 % dari target yang telah di tentukan. Untuk **indikator Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa** dengan indikator kinerja **Persentase desa maju di wilayah kecamatan** terealisasi sebesar 78% atau 100 % dari target yang telah di tentukan, untuk indikator **Meningkatnya peran serta masyarakat dan stake holder terkait dalam pengendalian trantibum** dengan Indikator kinerja **Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan masyarakat** dan **Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan stake holder** terealisasi sebesar 52,63 % dan 84% atau sebesar 70,17 % dan 112,28 % dari target yang telah di tentukan.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Praya Tengah

#### 1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka **meningkatkan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/kelurahan**. Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas Kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang didelegasikan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan

#### 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Praya Tengah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dari 12 Kecamatan yang ada yang memiliki Tugas Pokok menurut Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah, disebutkan bahwa **Tugas Pokok** Kecamatan adalah :

1. Kecamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi:
  - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
  - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

- g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Kabupaten dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas Kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang didelegasikan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pelaksanaan kewenangan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan menyelenggarakan **fungsi**:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaran kegiatan desa dan/atau kelurahan;

- h. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

## 1.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Praya Tengah dan Kelurahan sebanyak 41 orang dengan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan adalah 30 berbanding 11 orang.

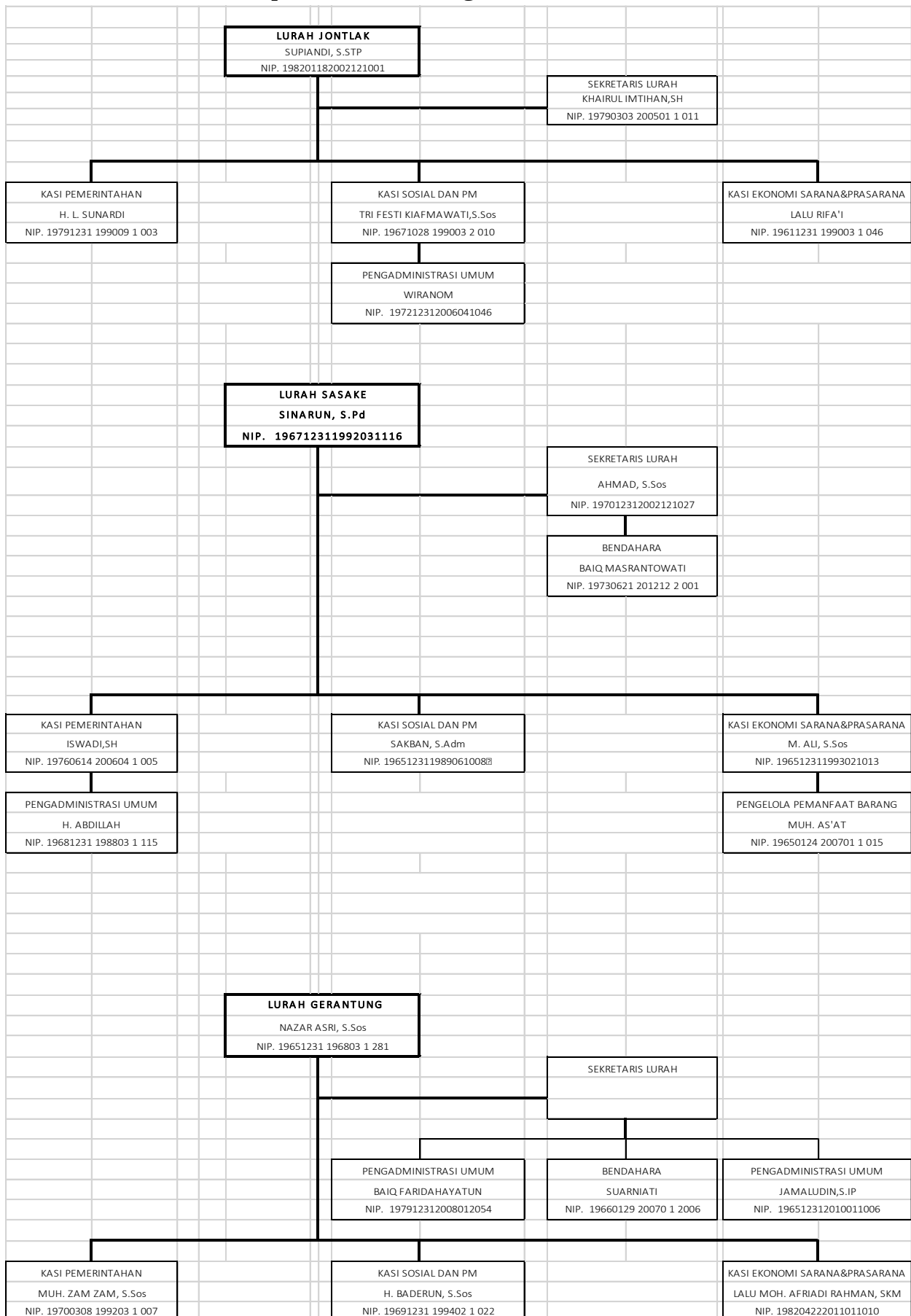
REGISTER PEGAWAI KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH DAN KELURAHAN							
KEADAAN : 31 DESEMBER 2021							
No	Nama	L/P	Gol.	Eselon	Nama Jabatan	Pendidikan Akhir	Latjab
1	LALU SAMSUL HILAL, S.IP.	L	IV/a	III.A	Camat Praya Tengah	S1 ILMU Pemerintahan	
2	SADIRUN ANWAR, S.Sos.	L	IV/a	III.B	Sekretaris Kecamatan Praya Tengah	S1 Administrasi Negara	
3	NAZAR ASRI, S.Sos.	L	III/d	IV.a	Lurah Gerantung	S1 - S-1 Ilmu Administrasi Negara	
4	DRS. H. ABDUL QADIR	L	III/d	IV.a	Kasi Trantibum Kec. Praya Tengah	S1 Administrasi Negara	Diklatpim
5	LALU RAHMAT, S.Sos	L	III/d	IV.a	Kepala Seksi Pemerintahan	S1 - S-1 Ilmu Administrasi Negara	
6	SINARUN, S.Pd	L	III/d	IV/a	Lurah Sesake	S1 - S-1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	
7	SUPIANDI, S.STP.	L	III/d	IV.a	Lurah Jontak	D4 STPDN	Diklatpim TK.IV
8	BAIQ SADIATUN S.Sos	P	III/d	IV.B	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	S1 Ilmu Administrasi Negara	Diklatpim
9	MUHAMMAD ZAM ZAM, S.Sos	L	III/d	IV.b	Kepala Seksi Pemerintahan	S1 - S-1 Ilmu Administrasi Negara	
10	LALU SUNARDI R, ST.	L	III/d	IV.b	Kepala Seksi Pemerintahan	S1 - S-1 Teknik sipil	
11	LALU RIFA'I, S.IP	L	III/d	IV.b	Kepala Seksi Perekonomian, Sarana dan Prasarana	S1 - S-1 Ilmu Pemerintahan	
12	TRI FESTI KIAFWAWATI, S.Sos	P	III/d	IV.b	Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	S1 - S-1-Administrasi Negara	
13	M. ALI, S.Sos	L	III/d	IV.b	Kepala Seksi Perekonomian, Sarana dan Prasarana	S1 - S-1 Ilmu Administrasi Negara	
14	SAKBAN, S.ADM.	L	III/d	IV.B	Kasi Sosial dan Pemberdayaan masyarakat	S1 Ilmu Administrasi Negara	
15	BADERUN, S.Sos.	L	III/d	IV.b	Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	S1 - S-1 Ilmu Administrasi Negara	
16	BAIQ INGE APRIANTI, S.IP	P	III/d	IV.b	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S1 - S-1 Ilmu Pemerintahan	
17	MUHAJAR, S.IP	L	III/c	IV.a	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	S1 - S-1 Ilmu Pemerintahan	
18	H. EDY SUPRIADI, S.IP, MH	L	III/c	IV.A	Kepala Seksi Pemberdayaan masyarakat	S2 Magister Ilmu Hukum	
19	ISWADI, SH	L	III/c	IV.b	Kepala Seksi Pemerintahan	S1 - S-1-Hukum	
20	AHMAD, S.SOS.	L	III/C	IV.B	Sekretaris Lurah Sasake	S1 Ilmu Administrasi Negara	
21	LALU MOH. AFRIADI RAHMAN, SKM	L	III/C	IV.B	Kasi Perekonomian Sarana dan Prasarana	S1 Ilmu Administrasi Negara	
22	ROHAYAH, SE	P	III/c	JFU	Pengelola Data Perencanaan	S1 Ekonormi Manajemen	
23	MUHSIN, S.IP.	L	III/b	IV.A	Seksi Pelayanan Umum	S1 Ilmu Pemerintahan	
24	KHAIRUL IMTIHAN, SH	L	III/b	IV.b	Sekretaris Lurah Jontak	S1 - S-1-Ilmu hukum	
25	MUHAMAD IMAN, S.IP	L	III/b	JFU	Pengadministrasi Perizinan	S1 - S-1 Ilmu Pemerintahan	
26	JAMALUDIN, S.IP	L	III/b	JFU	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	S1 - S-1 Ilmu Pemerintahan	
27	NURY ROHMAYATI	P	III/b	JFU	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	SLTA - Madrasah Aliyah	
28	ABDILLAH	L	III/a	JFU	Pengadministrasi Umum	SLTA - PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	
29	SUARNIATI, S.Sos	P	III/a	JFU	Pengadministrasi Umum	S1 - S-1 Ilmu Administrasi Negara	
30	SETIAWAN	L	III/a	JFU	Pengedministrasi Perencanaan	SLTA - MADRASAH ALIYAH IPA	
31	BAIQ ZULPAJRIATI HASANAH, S.Adm	P	III/a	JFU	Bendahara	S1 - S-1 Ilmu Administrasi Negara	
32	BAIQ FARIDAHAYATUN	P	II/d	JFU	Pengadministrasi Umum	SLTA	
33	BAIQ ENI SARTIKA, A.Md	P	II/d	JFU	Pengelola Kepegawaian	D3 - D-III MANAJEMEN ADM.PERKANTORAN	
34	MUH AS'AT	L	II/d	JFU	Pengadministrasi Umum	SLTA - SMA A.3/IPS	
35	HASANUDDIN	L	II/d	JFU	Pengadministrasi Umum Pemerintahan	SLTA - SMA A.2/BIOLOGI	
36	SRI MARHAIDA	P	II/d	JFU	Pengadministrasi Pemerintahan	SLTA - SMA A.1/FISIKA	
37	BAIQ MASRANTOWATI	P	II/c	JFU	Penata Keuangan	SLTA - SMK	
38	L. HARI BAGUS	L	II/c	JFU	Pengadministrasi Kependudukan	SLTA - SMA A.1/FISIKA	
39	KAMIL	L	II/b	JFU	Pengadministrasi Umum Kesra	SLTA - PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	
40	RAMLI	L	II/b	JFU	Pengadministrasi Umum PMD	SLTA - SMA - IPA	
41	MUHAMAD SAHIR	L	II/a	JFU	Pengemudi	SLTP - PERSAMAAN SLTP (PAKET B)	

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021



## STRUKTUR KELURAHAN

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : 93 Tahun 2016



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah: ” **MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA** ”

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

- 1. Merawat Ahlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;**
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;
- 3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;**
4. Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.

Kantor Camat Praya Tengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani urusan pemerintahan unsur kewilayahan mendukung visi dan misi RPJMD 2021-2026, terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 dan ke - 3 yaitu ” **Merawat Ahlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat.**”, dan “**Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih**”.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Renstra Kantor Camat Praya Tengah 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN				
KECAMATAN PRAYA TENGAH				
<b>VISI :</b>	<b>MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA</b>			
<b>MISI 1 :</b>	<b>MERAWAT AHLAQUL KARIMAH DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT</b>			
TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Terwujudnya stabilitas sosial masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stake holder terkait dalam pengendalian trantibum	Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
				Peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
<b>MISI 3 :</b>	Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih			
2	Meningkatnya kinerja kecamatan	Meningkatnya kualitas layanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan
		Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Peningkatan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan
				Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

### 2.1.1 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kantor Camat Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

### 2.1.2 SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kantor Camat Praya Tengah

Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Meningkatnya kualitas layanan kecamatan

#### **2.1.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efesien.

#### **2.1.4 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2021, Kantor Camat Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

^	Kode Rek	Uraian Urusan, Organisasi Program dan Kegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.128.937.949
1	7.01.01.2.10	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.071.409
1	7.01.01.2.10.01	Sub Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.071.852
2	7.01.01.2.01.06	Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.557
2	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Prangkat Daerah	3.867.109.003
1	7.01.01.2.02.01	Sub Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.844.477.839
2	7.01.01.2.02.05	Sub Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.567.312
3	7.01.01.2.02.07	Sub Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16.063.852
3	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.360.781
1	7.01.01.2.06.01	Sub Penyedia Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.912.881
2	7.01.01.2.06.02	Sub penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.749.900
	7.01.01.2.06.04	Sub Penyedia Bahan Logistik Kantor	19.560.000
	7.01.01.2.06.09	Sub Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.138.000
4	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.920.756
	7.01.01.2.07.05	Sub Pengadaan Mebel	20.920.756
5	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.321.000
	7.01.01.2.08.02	Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	19.321.000
6	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.155.000
	7.01.01.2.09.01	Sub Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	36.155.000
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	150.630.899
7	7.01.02.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	55.076.292
	7.01.02.02.01.0	Sub Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	55.076.292
8	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	95.554.607
	7.01.02.2.04.03	Sub Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	95.554.607
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.972.198.097
9	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	17.202.601
	7.01.03.2.01.01	Sub Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.202.601
		TOTAL KELURAHAN	2.954.995.496
		KELURAHAN JONTLAK	995.027.283
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	937.177.283
	7.01.03.2.02.01	Sub Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.735.659
	7.01.03.2.02.02	Sub Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	544.975.832
	7.01.03.2.02.03	Sub Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	371.665.792
	7.01.03.2.02.04	Sub Evaluasi Kelurahan	10.800.000
	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	57.850.000
	05.01	Sub Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	57.850.000
		KELURAHAN GERANTUNG	965.891.148
	7.01.03.2.02.01	Sub Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.827.232
	7.01.03.2.02.02	Sub Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	571.821.149
	7.01.03.2.02.03	Sub Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	321.363.511
	7.01.03.2.02.04	Sub Evaluasi Kelurahan	15.284.456
	05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa Kelurahan	51.594.800
		KELURAHAN SASAKE	994.077.065
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	943.990.565
	7.01.03.2.02.01	Sub Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.244.140
	7.01.03.2.02.02	Sub Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	542.613.165
	7.01.03.2.02.03	Sub Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	366.318.500
	7.01.03.2.02.04	Sub Evaluasi Kelurahan	29.814.760
	05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa Kelurahan	50.086.500
4	7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	79.078.441
10	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	79.078.441
	7.01.04.2.01.01	Sub Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional dan Intansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	79.078.441
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERITAHAN UMUM	228.586.388
11	7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	228.586.388
	7.01.05.2.01.04	Sub Pembinaan Kerukukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	218.586.788
	7.01.05.2.01.05	Sub Penangan Konflik Sosial Sesuai Ktentuan Peraturan Perundang undangan	9.999.600
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	74.730.083
12	7.01.06.2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	74.730.083
	7.01.06.2.01.02	Sub Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30.321.352
	7.01.06.2.01.03	Sub Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	31.509.431
	7.01.06.2.01.17	Sub Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah	12.899.300
		JUMLAH KECAMATAN	4.679.166.361
		JUMLAH KELURAHAN	2.954.995.496
		JUMLAH KECAMATAN DAN KELURAHAN	7.634.161.857

## 2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
TAHUN ANGGARAN 2021				
SKPD : KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH				
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	KET.
1	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	80 POIN	
2	Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa maju di wilayah kecamatan	78%	
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stake holder terkait dalam pengendalian trantibum	Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan masyarakat	75%	
		Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan stake holder	75%	

## 2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH TAHUN 2021														
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI SAAT INI (2020)	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN 2020	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE -						KONDISI AKHIR
								1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10
1	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan <b>Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017</b> tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan	Sebaran Kuisioner di Kantor Camat Praya Tengah	Kasi Pelayanan Umum	79,39	80	80	80	81	83	86	89	89
2	Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa maju di wilayah kecamatan	Jumlah Desa Maju di bagi jumlah desa di kali 100	Data Desa Mandiri	Kasi PMD	0	0	78%	78%	89%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stake holder terkait dalam pengendalian trantibum	Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kasus yang ditangani bersama masyarakat dibagi jumlah kasus dikali 100	Polsek, Desa/ Kelurahan (BKD/ BKK), POL PP	Kasi Trantib	0	0%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan stake holder	Jumlah kasus yang ditangani dengan melibatkan stakeholder dibagi jumlah kasus dikali 100	Polsek, Desa/ Kelurahan (BKD/ BKK), POL PP	Kasi Trantib	0	0%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%

## 2.4. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN			
SKPD			
			
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021			
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:			
Nama	:	<b>Drs. H. AHMAD SAMSURIADI, M.Si</b>	
Jabatan	:	CAMAT PRAYA TENGAH	
Selanjutnya disebut pihak pertama			
Nama	:	<b>H. MOH. SUHAILI FT, SH., MM</b>	
Jabatan	:	BUPATI LOMBOK TENGAH	
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua			
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.			
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.			
		Praya, April 2021	
Pihak Kedua,		Pihak Pertama,	
<b><u>H. MOH. SUHAILI FT, SH., MM</u></b>		<b><u>Drs. H. AHMAD SAM SURIADI, M.Si</u></b>	
		NIP. 19721204 199101 1 001	

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan tahun ketiga Kantor Camat Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan Renstra perubahan, sehingga capaian kinerja tahun 2021 tersebut mencerminkan capaian kedua renstra perubahan Tahun 2016-2021. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :

Sasaran strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2		3
Meningkatnya kualitas layanan	1	Indeks kepuasan masyarakat	80
Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	1	Persentase desa maju di wilayah kecamatan	78%
Meningkatnya peran serta masyarakat dan stake holder terkait dalam pengendalian trantibum	1	Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan masyarakat	75%
	2	Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan stake holder	75%

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar Rp. 7.634.161.857,00 (*Tujuh milyar enam ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*).

RENCANA SASARAN KINERJA PEGAWAI			
OPD : KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH		PERIODE PENILAIAN : JANUARI S.D DESEMBER TAHUN 2021	
PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	DRS. H. AHMAD SAMSURIADI, M.S	NAMA	LALU FIRMAN WIJAYA, ST.,MT
NIP	NIP.197212041991011001	NIP	197005042000031007
PANGKAT/GOL RUANG	IV/b	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Tk. I (IV/b)
JABATAN	CAMAT PRAYA TENGAH	JABATAN	Setda Kabupaten Lombok Tengah
INSTANSI	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH	INSTANSI	KANTOR BUPATI LOMBOK TENGAH
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
1	Meningkatnya kualitas layanan publik	Data organisasi sosial politik (sospol), pamswakarsa yang ada di kecamatan dan desa/kelurahan	80
2	Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	78%
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stake holder terkait dalam pengendalian trantibum	Koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum	75%
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stake holder terkait dalam pengendalian trantibum	Data pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	75%
<b>B. KINERJA TAMBAHAN</b>			
1			
2			
			Praya Tegah, januari 2021
	Bupati Lombok Tengah		Camat Praya Tengah
	<u>H. MOH. SUHAILI FT, SH., MM</u>		<u>Drs. H. AHMAD SAMSURIADI, M.Si</u> NIP. 19721204 199101 1 001

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d 100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d < 85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d < 70	KURANG
5.	Nilai < 55	SANGAT KURANG

### III.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran

Kantor Camat Praya Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kantor Camat Praya Tengah Tahun 2021. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. adapun capaian kinerja sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut:

#### III.2.1. SASARAN NO 1 : Meningkatnya kualitas layanan publik

Sasaran No 1 **Meningkatnya kualitas layanan publik** tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu: **Indeks Kepuasan Layanan Kecamatan;**

#### III.2.2. SASARAN NO 2 : Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

Sasaran No 2 **Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa** tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu: **Persentase desa maju di wilayah kecamatan;**

#### III.2.3. SASARAN NO 3 : Meningkatnya peran serta masyarakat dan stake holder terkait dalam pengendalian trantibum

Sasaran No 3 **Meningkatnya peran serta masyarakat dan stake holder terkait dalam pengendalian trantibum** tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

1. **Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan masyarakat;**
2. **Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan stake holder**

Capaian dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	80	83,48	104,35	79,39	89	Sebaran Kuisioner di Kantor Camat Praya Tengah
b	Persentase desa maju di wilayah kecamatan	Persen	78%	78%	100,00	0	100%	Indeks Desa Membangun (IDM)
c	Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan masyarakat	Persen	75%	52,63%	70,17	0	75%	Polsek, Desa/Kelurahan (BKD/BKK), POL PP
d	Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan stake holder	Persen	75%	84%	112,28	0	75%	Polsek, Desa/Kelurahan (BKD/BKK), POL PP

Adapun penjelasan pencapaian indikator meliputi:

1. Penjelasan pencapaian indikator kinerja “Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat” adalah :
  1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat adalah data informasi tentang kepuasan masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.
  2. Metode pengukuran pencapaian indikator telah sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Metode yang di gunakan Memuat karaktarestik populasi.
  3. Sumber data di peroleh dari keterwakilan anggota sampel dan jumlah responden, selain itu disajikan jumlah responden yang berhasil di kumpulkan dan yang berhasil di tindak lanjuti. Kuisioner survey langsung diberikan kepada penerima layanan kecuali bagi orang tua yang kurang bisa dalam hal baca tulis, petugas survey langsung menanyakan dalam bentuk wawancara.

4. Program/Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator adalah Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik/Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
5. Dokumentasi / foto-foto.
6. Capaian indikator “Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat “ tahun 2021 sebesar 83,48 Poin dengan kriteria “Baik” dari target sebesar 80 poin atau sebesar 104,35 % apabila di ukur dari capaian target yang ingin dicapai sedangkan pada tahun 2020 untuk Indikator “Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat” sebesar 79,38 Poin dengan kriteria “Baik” dari target sebesar 80 poin atau sebesar 99,225 % apabila di ukur dari capaian target yang ingin dicapai.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Dengan demikian maka hasil perhitungan pencapaian kinerja pada Kecamatan Praya Tengah pada Tahun 2021 sesuai dengan table di atas sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Layanan Kecamatan :

$$\frac{83,48}{80} \times 100\% = 104,35 \%$$

NO	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	76,61 - 88,30	B	Baik
4	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

7. Pendukung pencapaian target indikator pada tahun 2021 adalah adanya dukungan anggaran terkait pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.

Adapun penjelasan pencapaian indikator meliputi:

**2. Indikator “Persentase desa maju di wilayah kecamatan” adalah ;**

1. Persentase desa maju di wilayah kecamatan adalah persentase desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
2. Rumus pengukuran pencapaian indikator adalah Jumlah Desa Maju di bagi jumlah desa di kali 100
3. Sumber data di peroleh dari Indeks Desa Membangun
4. Program/Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator adalah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
5. Dokumen pendukung. (terlampir)
6. Capaian indikator “Persentase desa maju di wilayah kecamatan “ tahun 2021 sebesar 78 % atau 100 % dari Target yang ingin dicapai.
7. Pendukung pencapaian target indikator pada tahun 2021 ini adalah tersedianya data Indek Desa Membangun dari kementerian Desa dimana pengukuran indeks dilakukan dengan beberapa instrumen penilaian desa membangun.

**3. Indikator “Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan masyarakat”**

1. Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur.
2. Rumus pengukuran pencapaian indikator adalah Jumlah kasus yang ditangani bersama masyarakat dibagi jumlah kasus dikali 100
3. Sumber data di peroleh dari Polsek, Desa/Kelurahan (BKD/BKK), POL PP.
4. Program/Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator adalah Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum/Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
5. Dokumen pendukung. (terlampir)

6. Capaian indikator “Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan masyarakat “ tahun 2021 sebesar 52,63 % atau 70,17 % dari Target yang ingin dicapai.
7. Penghambat pencapaian target indikator pada tahun 2021 ini adalah masih kurangnya kepedulian masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan trantibum.
8. **Indikator “Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan stake holder”**
  1. Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur.
  2. Rumus pengukuran pencapaian indikator adalah Jumlah kasus yang ditangani dengan melibatkan stakeholder dibagi jumlah kasus dikali 100
  3. Sumber data di peroleh dari Polsek, Desa/Kelurahan (BKD/BKK), POL PP.
  4. Program/Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator adalah Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum/Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
  5. Dokumen pendukung. (terlampir)
  6. Capaian indikator “Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan masyarakat “ tahun 2021 sebesar 84 % atau 112,28% dari Target yang ingin dicapai.
  7. Pendukung pencapaian target indikator pada tahun 2021 ini adalah adanya koordinasi yang baik antara instansi terkait termasuk dengan instansi vertikal.

Capaian indikator “Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan stake holder “ tahun 2021 belum bisa terealisasi karena merupakan indikator baru yang terdapat pada Renstra Kecamatan Praya Tengah Tahun 2021 s/d Tahun 2026. Perumusan Renstra Tahun 2021 s.d 2026 diselesaikan padai akhir Tahun 2021 sehingga untuk penilaian Indikator kinerja pada tahun 2021 masih mengacu pada Indikator kinerja Renstra Tahun 2016 s.d 2021.

### **III.3. Evaluasi pencapaian Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis kantor Camat Praya Tengah Tahun 2021**

Pencapaian Kinerja tujuan strategis yang diraih Kantor Camat Praya Tengah pada dasarnya merupakan akumulasi dan pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Tujuan dan Sasaran yang digunakan diambil dari dokumen Renstra Tahun 2021 s.d 2026 sehingga pencapaian kinerja masih sangat kurang di karenakan perbedaan indikator Kinerja antara Renstra 2016 s.d 2021 dengan Renstra 2021 s.d 2026. Secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan strategis Kantor Camat Praya Tengah Tahun 2021 dipaparkan pada tabel sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN		KRITERIA CAPAIAN SASARAN	RATA- RATA CAPAIAN TUJUAN	KRITERIA PENCAPAIAN TUJUAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN TAHUN SEBELUMNYA (2020)
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Nilai Kinerja camat			102,18	"sangat baik"	"sangat baik"
		1	Indeks kepuasan masyarakat	104,35	"sangat baik"	-	-
		2	Persentase desa maju di wilayah kecamatan	100,00	"sangat baik"	-	-
2	Terwujudnya stabilitas sosial masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum			91,23	"sangat baik"	"sangat baik"
		1	Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan	70,17	"baik"	-	-
		2	Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan stake	112,28	"baik"	-	-
Rata-rata Total			96,70	"sangat baik"	96,70	"sangat baik"	"sangat baik"

#### III.4. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Kantor Camat Praya Tengah dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2021 termasuk realisasi anggaran yang terdapat di Kelurahan yang berada di wilayah kecamatan praya Tengah. Kelurahan merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari OPD Kantor Camat, dan merupakan entitas dari kecamatan dimana Program dan Kegiatan Kelurahan tertuang dalam rencana kerja kecamatan dengan **Program Pemberdayaan**

**Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut**

:

7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
7.01.03.2.02.01	Sub	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.01.03.2.02.02	Sub	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03	Sub	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan
7.01.03.2.02.04	Sub	Evaluasi Kelurahan
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	
7.01.03.2.05.01	Sub	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

Anggaran dan Realisasi dari Pelaksanaan Program/Kegiatan Kecamatan Praya Tengah									
KECAMATAN PRAYA TENGAH									
No dan Kegiat yang dilaks	Belanja Operasional			Belanja Modal	Total Belanja	Realisasi Belanja	(%)	Unit kerja yang melaksanakan Program/ Kegiatan	
	Belanja Tidak Langsung	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24.071.409		24.071.409	23.914.357	99,35	
2	Adminstrasi Keuangan Prangkat Daerah	3.844.477.839	2.394.000	20.237.164		3.867.109.003	3.775.960.692	97,64	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			161.360.781		161.360.781	151.433.841	93,85	
4	Pengadaan Barng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.920.756	20.920.756	20.915.700	99,98	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			19.321.000		19.321.000	18.314.705	94,79	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			36.155.000		36.155.000	33.954.945	93,91	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan			55.076.292		55.076.292	53.692.800	97,49	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat			71.554.607	24.000.000	95.554.607	90.909.760	95,14	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			17.202.601		17.202.601	17.188.700	99,92	
2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan jontlak		4.956.000	866.457.311	65.763.972	937.177.283	921.305.610	98,31	Kelurahan Jontlak
3	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa Kelurahan (Jontlak)			57.850.000		57.850.000	57.843.250	99,99	Kelurahan Jontlak
4	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gerantung			857.604.573	56.691.775	914.296.348	909.284.357	99,45	Kelurahan Gerantung
5	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa Kelurahan (Gerantung)			51.594.800		51.594.800	51.528.300	99,87	Kelurahan Gerantung
6	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan sasake			919.990.565	24.000.000	943.990.565	915.191.531	96,95	Kelurahan Sasake
7	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa Kelurahan (Sasake)			50.086.500		50.086.500	50.086.500	100,00	Kelurahan Sasake
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			79.078.441		79.078.441	78.658.875	99,47	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERITAHAN UMUM									
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			228.586.388		228.586.388	221.405.739	96,86	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
1	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			74.730.083		74.730.083	66.404.852	88,86	
TOTAL		3.844.477.839	7.350.000	3.590.957.515	191.376.503	7.634.161.857	7.457.994.514	97,69	

Penyerapan anggaran belanja Kantor Camat Praya Tengah TA. 2021 sebesar 97,69 % dari total anggaran yang tersedia. Dengan melihat realisasi anggaran di atas menunjukan bahwa serapan anggaran sudah sangat baik atau lebih dari 91 %

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Secara umum Kantor Camat Praya Tengah telah dapat memenuhi tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pada organisasi serta dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam satu rantai kerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Seiring dengan berubahnya Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Praya Tengah sesuai dengan perubahan Revisi Renstra Kantor Camat Praya Tengah pada akhir tahun 2018, dengan Indikator Kinerja yaitu :

1. Indikator Tujuan “Nilai SAKIP Kecamatan”;
2. Indikator Sasaran “Indeks Kepuasan Layanan Kecamatan”
3. Indikator Sasaran “Nilai Kinerja Camat”

Maka Kecamatan Praya tengah perlu merevisi semua dokumen yang berkaitan dengan Indikator Tujuan dan Sasaran sehingga semua Dokumen perencanaan untuk mengukur kinerja SKPD dapat terealisasi dengan baik.

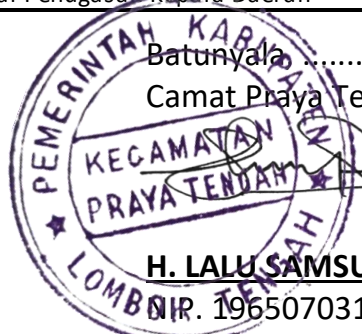
Capaian Tujuan dan Sasaran pada tahun 2021 belum bisa diukur secara keseluruhan, Nilai SAKIP Kecamatan akan dihitung oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, Nilai Kinerja Camat diukur/dihitung oleh Bagian APU Setda Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Indeks Kepuasan Layanan Kecamatan sudah bisa dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat.

## HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD TAHUN 2021

NO.	SASARAN RPJMD	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2021	SASARAN RENSTRA SKPD	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN SKPD TAHUN 2021	ANGGARAN PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah	Penyelenggaraan administrasi pelayanan umum	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.071.409
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.867.109.003
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.360.781
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.920.756
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.321.000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.155.000
					<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	55.076.292
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	95.554.607
			Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa maju di wilayah kecamatan	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	17.202.601
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jontlak	937.177.283
					Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa Kelurahan (Jontlak)	57.850.000

					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gerantung	914.296.348
					Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa Kelurahan (Gerantung)	51.594.800
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan sasake	943.990.565
					Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa Kelurahan (Sasake)	50.086.500
					<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	
					Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	74.730.083
			Meningkatnya peran serta masyarakat dan stake holder terkait dalam pengendalian trantibum	Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan masyarakat	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
				Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan stake holder	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	79.078.441
					<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	228.586.388

Batunyalu, ..... Januari 2022  
 Camat Praya Tengah,



**H. LALU SAMSUL HILAL, S.IP**  
 NIP. 196507031994011001

REKAP STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN				
KECAMATAN PRAYA TENGAH				
TAHUN 2021				
KODE DESA	NAMA DESA	NILAI IDM	STATUS IDM	PERINGKAT
5202102008	PENGADANG	0,8337	MANDIRI	2.134
5202102010	PEJANGGIK	0,7946	MAJU	5.360
5202102007	LAJUT	0,7648	MAJU	8.655
5202102009	KELEBUH	0,7594	MAJU	9.332
5202102004	JURANG JALER	0,7487	MAJU	10.820
5202102011	DAKUNG	0,7333	MAJU	13.171
5202102006	BATUNYALA	0,7314	MAJU	13.504
5202102005	BERAIM	0,7000	BERKEMBANG	21.632
5202102012	PRAIMEKE	0,6792	BERKEMBANG	29.197
Kabupaten Lombok Tengah berada di peringkat <b>55 dari 434</b> Kabupaten, sedangkan Kecamatan Praya Tengah berada di peringkat 737 dari 6.526 Kecamatan dengan nilai IDM sebesar 0,7495 dengan status <b>IDM MAJU</b>				
Sasaran kedua kecamatan adalah meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator kinerja " <b>Persentase Desa Maju di Wilayah Kecamatan</b> " dengan perhitungan Jumlah Desa Maju di bagi Jumlah Desa di Kali 100 = <b>77,78 %</b>				

Daftar Gangguan Trantibum					
Tahun Anggaran 2021					
No	Jenis gangguan trantibum	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus yang ditangani bersama		Keterangan
			Masyarakat	Stakeholder	
1	2	3	4	5	6
1	Pencurian	2		2	
2	Pembunuhan				
3	Pemeriksaan/Pencabulan				
4	Curanmor	5		5	
5	Penemuan Mayat	1		1	
6	Bunuh Diri				
7	Rumah Ambruk				
8	Tawuran				
9	Bencana Alam Banjir				
10	Bencana Tanah Longsor				
11	Gempa bumi				
12	Angin Puting Beliung				
13	Kebakaran				
14	Narkoba				
15	Miras	1		1	
16	Perjudian				
17	Penipuan				
18	Tabrak Lari				
19	Wabah Penyakit	1	1	1	
20	Polusi Udara				
21	Polusi Limbah Cair/Padat				
22	Unjuk Rasa/Demo	5	5	5	Desa Kelebu, Desa Pejanggih
23	Penganiayaan				
24	Jumlah Konflik Antar Masyarakat	4	4	1	Desa Prai Meke
TOTAL		19	10	16	
Sasaran ketiga "Meningkatnya peran serta masyarakat dan stake holder terkait dalam pengendalian trantibum" dengan indikator kinerja "Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan masyarakat" dengan perhitungan "Jumlah kasus yang ditangani bersama masyarakat dibagi jumlah kasus dikali 100" = 52,63 % dan "Jumlah kasus yang ditangani dengan melibatkan stakeholder dibagi jumlah kasus dikali 100" = 84,21 %					